

**ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK PARKIR DALAM
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI
KABUPATEN WONOGIRI**



Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi

Oleh :

Dyah Ayu Kusuma Wardani
B 200 050 185

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2009**

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan awal dimulainya otonomi daerah, yaitu diberikannya peran yang lebih besar kepada kabupaten dan kota untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Tujuan pemberian otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pemerintah daerah merupakan pihak yang paling berwenang dalam mengatur daerahnya. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat cepat mengidentifikasi sektor-sektor potensial sebagai motor penggerak pembangunan daerah, terutama melalui upaya pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan potensi kemandirian

daerah melalui PAD dapat tercermin dari kemampuan pengembangan potensi dan peran serta masyarakat melalui pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang berlangsung terus-menerus bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik material maupun spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut pembiayaan menjadi salah satu variabel penting dalam pembangunan daerah, terutama yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah sebagai salah satu sumber PAD diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Dalam konteks daerah, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah (misal. propinsi, kabupaten, kotamadya) yang diatur berdasarkan peraturan daerah dan hasil pungutannya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Sedangkan menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pasal 1 ayat 6, pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri adalah pajak parkir. Pajak parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya.

Masalah parkir sendiri menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri karena diharapkan dari sektor ini hasil pemungutan pajak parkir sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah menjadi lebih optimal. Dengan luasnya wilayah Kabupaten Wonogiri dan semakin meningkatnya tempat-tempat umum yang memberikan fasilitas kepada publik seperti tempat pariwisata, rumah makan, rumah sakit, hotel, swalayan, dan lain-lain maka lahan parkir pun juga akan semakin luas. Oleh karena itu, pajak parkir dirasa dapat memberikan kontribusi yang cukup menjanjikan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri. Dinas pendapatan daerah perlu mengadakan penertiban dan monitoring terhadap area parkir milik pribadi atau badan dalam hal penyelenggaraan dan pembayaran pajaknya sehingga tidak ada pihak yang seenaknya menyelenggarakan area parkir di wilayahnya tanpa mengeluarkan pajak kepada pemerintah daerah.

Hal yang membedakan antara pajak parkir dengan retribusi parkir yaitu terletak pada penggunaan lahan parkirnya. Dalam retribusi dikenakan terhadap pembayaran atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum, yang masih merupakan fasilitas milik pemerintah, yang ditetapkan oleh kepala

daerah. Sedangkan dalam pajak parkir dikenakan terhadap pembayaran atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, yang berarti fasilitas milik pribadi atau badan dan biasanya dikelola oleh pihak swasta.

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan dari pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah terutama pajak parkir adalah dengan melihat efektifitas penerimaan pajak parkir tersebut. Tetapi pada kenyataannya dinas pendapatan daerah mengalami hambatan-hambatan dalam pemungutannya, diantaranya karena tingkat kesadaran wajib pajak yang masih kurang dan adanya pengadaan tempat parkir liar tanpa ijin sehingga akan mengurangi jumlah penerimaan daerah dari sektor parkir. Atas dasar gambaran obyek penelitian yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul : **“ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah laju pertumbuhan pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri?
2. Apakah penerimaan pajak parkir di dalam tahun anggaran 2004/2005 sampai dengan 2006/2007?

3. Apa sajakah hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak parkir di Kabupaten Wonogiri ?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui laju pertumbuhan, hasil guna (efektifitas), serta hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dalam melakukan pemungutan terhadap pajak parkir selama tahun anggaran 2004/2005 sampai dengan 2007/2008.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui laju pertumbuhan pajak parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Wonogiri
2. Untuk mengetahui keefektifitasan yang dihasilkan pajak parkir di dalam tahun anggaran 2004/2005 sampai dengan 2006/2007
3. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam melakukan pemungutan pajak parkir di Kabupaten Wonogiri.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi dinas pendapatan daerah

Sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi dalam menentukan kebijakan mengenai pemungutan pajak daerah khususnya terhadap pajak parkir sebagai salah satu sumber PAD di Kabupaten Wonogiri.

2. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan atau wawasan bagi penulis tentang perpajakan khususnya mengenai pajak parkir yang telah diterapkan di Kabupaten Wonogiri.

3. Bagi pihak lain

Menjadi salah satu sumber acuan tambahan atau referensi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi dan data pembandingan bagi penelitian sejenis.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain mengenai tinjauan umum pajak daerah sebagai sumber PAD, yang meliputi pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, perbedaan pajak dengan jenis pungutan lain, pendapatan bukan asli daerah,

pengertian pajak daerah, penggolongan pajak daerah, sistem pemungutan pajak daerah, laju pertumbuhan dan hasil guna (efektivitas). Serta mengenai tinjauan umum tentang pajak parkir yang meliputi pajak parkir, tata cara perhitungan dan penetapan pajak, dasar hukum pemungutan pajak parkir, obyek dan subyek pajak parkir, dan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak.

Bab III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini meliputi jenis penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, yaitu Kabupaten Wonogiri, yang meliputi keadaan geografis dan topografi. Gambaran umum Dipenda Kabupaten Wonogiri yang meliputi sejarah berdirinya Dipenda Kabupaten Wonogiri, tugas pokok dan fungsi Dipenda Kabupaten Wonogiri, dan struktur organisasi Dipenda Kabupaten Wonogiri. Serta analisis data yang meliputi perhitungan mengenai, laju pertumbuhan pajak parkir, hasil guna (efektifitas), dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak parkir.

Bab V : PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan, keterbatasan-keterbatasan dalam melakukan penelitian, serta saran-saran yang dapat diambil dari penelitian ini.